

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR:

- Abdullah, Rozali. 1991. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____.1994. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Cetakan Ketiga. PT Raja Grafindo Persada.
- Anggriani, Jum. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Attamimi, A, Hamid. Teori. 1992. *Perundang-undangan Indonesia Makalah* pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta:Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Basah, Sjachran. 1989. *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Budiharjo, Miriam. 1991. *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hakim, Aziz, Abdul. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta Celaban Timur : Pustaka Pelajar.
- Harahap, Zairin. 2001. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- H.R, Riawan . 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan Kedua*. Jakarta: Banyumedia Publishing.

Indroharto. 2005. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku III*. Jakarta: Pustaka Harapan.

Marbun, S.F. 2003. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta : Liberty.

Marzuki, Mahmud, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

MD, Mahmud. 1999. *Hukum dan Polar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.

M. Hadjon, Philipus, Dkk. 2002. *Pengantar Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Philips Dan Suratman. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Prodjohomidjojo, Mr. Martiman. 2004. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Publishing.

Sibuea, P, Hotma. 2010. *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Erlangga.

Soemitro, Ronny, Hanintjo. 1999. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumenter*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subekti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik Cetakan Pertama*. Jakarta: PT Grasindo.

Sukarna. *Sistim Politik*. 1979. Alumni.

Suratman Dan Philips. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Syahrani, Riduan. 2009. *Kata-Kata Mempelajari Ilmu Hukum*. Bandung:PT Alumni.

Tjandra, W.Riawan. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Toto pribadi, Zukifli Hamid dan Nazaruddin Sjamsuddin. 1998. "*Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Karunika Universitas Terbuka.

Wijoyo, Suparto. 2005. *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*. Surabaya: Peradilan Tata Usaha Negara, Airlangga University Press.

Wiyono, R. 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Lain:

www.kamusbahasaindonesia.org/politik/.

<https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2015/03/26/sengkarut-konflik-parpol/> oleh Refly Harun

<http://www.lemhannas.go.id/portal/in/daftar-artikel/2005>

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua Balai Pustaka.

www.belajarhukum27.blogspot.com/2014/12/makalah-peradilan-tata-usahanegara.html

Cholisin, “*Penangan Kasus Politik*”,
<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/PENANGANGANKASUSPOLITIK.PDF>

Djawamaku, Anto. “*Perpecahan Partai Politik, Pemberantasan Korupsi dan Berbagai Masalah Politik Lainnya*. Dalam Jurnal Analisis CSIS: Peran Masyarakat dan Demokrasi Lokal, Vol.34 No. 2, Jakarta, Hlm. 126-127.

<https://www.selasar.com/politik/meteor-itu-mahkamah-partai>

Peraturan Perundang-undangan:

- 1). Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77);
- 3). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
- 4). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35);
- 5). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8);
- 6). Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160);
- 7). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2).

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT